

2018

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA



PT BPR NUSANTARA ABDI MULIA
KUPANG
TAHUN 2018
[Pick the date]



DAFTAR ISI

Daftar isi	1
Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR Nusantara Abdi Mulia	
Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR Nusantara Abdi Mulia....	2
A Transparansi Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR Nusantara Abdi Mulia.....	2
1 Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> berdasarkan hasil <i>Self Assessment</i>	2
a Pelaksanaan tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi	2
b Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite	4
c Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern ...	5
d Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	5
e Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposure</i>)	6
f Rencana Strategi Bank	7
g Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	8
2 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi	9
3 Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	9
4 Paket/Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi	10
5 Shares Option	11
6 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	11
7 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	11
8 Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	13
9 Permasalahan Hukum	13
10 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	13
11 Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik.....	13
B Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	14
C Penutup.....	15
 LAMPIRAN	
1 Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR Nusantara Abdi Mulia	

3 R-7



PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BPR NUSANTARA ABDI MULIA TAHUN 2018

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemongan pada prinsip-prinsip GCG.

Tujuan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT. BPR Nusantara Abdi Mulia

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada *Stakeholders*.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

A. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab dewan Komisaris dan Direksi.

a.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dan Direksi berjumlah 1 (satu) orang.

Handwritten signature and initials.



2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Adrianto Hermawi
- Anggota Komisaris : Richard Funay

Dewan Direksi berjumlah 1 (satu) orang terdiri dari :

- Direktur : Agustinus Nagi

3. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*),

4. Antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam

17



operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2). Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

a.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung-jawab, antara lain sebagai berikut :

- Persetujuan / penetapan revisi RBB PT. BPR Nusantara Abdi Mulia Tahun 2018
- Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
- Persetujuan Surat Keputusan Pendelegasian Wewenang Direktur Utama.
- Persetujuan RBB tahun 2018
- Persetujuan untuk memantau berjalannya tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan oleh Karyawan terutama pada bagian kredit dan Remedial sesuai dengan rencana kerja dan peraturan yang berlaku sekaligus melakukan evaluasi rutin

b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

Belum dibentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko karena modal inti belum mencapai Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah).

Py



c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

c.1. Fungsi kepatuhan

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan, BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.

- Pejabat Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Pejabat Eksekutif wajib menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- Direktur BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

c.2. Fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dengan Tembusan ke Dewan Komisaris.
- Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

c.3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil

d. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

d.1. Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi.



- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Komite Pemantauan Risiko kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko Setiap Semester.

d.2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
- PT. BPR Nusantara Abdi Mulia belum sepenuhnya menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko sesuai ketentuan OJK, serta belum sepenuhnya melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

d.3. Sistem pengendalian intern

- Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Komisaris.

e. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BMPK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.



3. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
4. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2018 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait		
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu		
	b. Group	0	0

f. Rencana Strategis Bank

f.1. Rencana jangka pendek tahun 2018

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2018.

- Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
- Status Bank dalam Pengawasan Intensif (BDPI).

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Nusantara Abdi Mulia jangka pendek difokuskan pada strategi Bank untuk keluar dari Status BDPI dengan peningkatan profitabilitas untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan sampai dengan Desember 2018 adalah sebesar 2.59% dan rasio LDR sebesar 91,01%, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PT. BPR Nusantara Abdi Mulia
- Meningkatkan effort dalam upaya memperbaiki kualitas kredit dengan menurunkan nilai NPL dan penagihan terhadap kredit Hapus Buku



- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan bunga yang kompetitif dengan target utama penyerapan dana murah.
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

f.2. Rencana jangka menengah tahun 2018

1) Finansial

2) Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM di atas 10 %.
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Nusantara Abdi Mulia

3) Karyawan

- Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- Meningkatnya profesionalisme SDM PT. BPR Nusantara Abdi Mulia melalui *Competency Based Human Resources Management*.

g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.



2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan telah disajikan pada *Home Page* PT. BPR Nusantara Abdi Mulia, sesuai dengan ketentuan.
5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
6. PT. BPR Nusantara Abdi Mulia menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT. BPR Nusantara Abdi Mulia

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Nusantara Abdi Mulia tidak memiliki saham pada PT. BPR Nusantara Abdi Mulia, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan BPR	Jabatan BPR lain	Jabatan Prshn Lain	PS BPR/ Prshn Lain	Bidang Usaha
	Komut				
	Komisaris				
	Direktur				

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Dewan Komisaris Utama PT. BPR Nusantara Abdi Mulia tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Direksi PT. BPR Nusantara Abdi Mulia tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris PT. BPR Nusantara Abdi Mulia dalam hal ini Komisaris Utama mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham sedangkan komisaris lainnya dan Dewan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.



NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Adrianto Hermawi	Komut		√		√	√			√		√		√
Richard Funay	Komisaris		√		√		√		√		√		√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Agustinus Nagi	Direktur		√		√		√		√		√		√

4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2018 sebesar Rp 439 juta, sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2018 sebesar Rp 16 juta terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll)	2	Rp 189 Juta	2	Rp 250 juta
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	Rp 0 Juta	2	Rp 16 Juta

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	2 orang

Pf



5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

6. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 9,58%
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 2.54%
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,19%

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	Rp 7,9 juta	Rp 6,6 juta
2	Direksi	Rp 16.5 juta	Rp 6,5 juta
3	Pegawai	Rp 11,5 juta	Rp 1,2 juta

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris minimal sebanyak 4 kali dalam setahun, dengan rincian sebagai berikut :

➤ Rapat I tanggal 25 April 2018

Peserta Rapat :

- Komisaris
- Direksi
- Staf bagian Kredit dan Remedial

Materi Rapat :

- Evaluasi khusus bagian Kredit dan Remedial Triwulan 1 tahun 2018
- Rapat II tanggal 09 Juli 2018

Peserta Rapat

- Komisaris
- Direksi



- Staf SPI
- Kepala Bagian dan Staf bagian Kredit dan Remedial

Materi Rapat :

- Evaluasi khusus bagian Kredit dan Remedial Triwulan 2 tahun 2018
 - Pembahasan dan pemaparan strategi penurunan NPL oleh Kabag Kredit dan Remedial
- Rapat III tanggal 14 Agustus 2018

Peserta Rapat :

- Komisaris
- Direksi
- Kepala Bagian Kredit dan Remedial

Materi Rapat :

- Penetapan untuk Membuat Simulasi CAR dan Laba Rugi untuk keluar dari status BDPI
- Penetapan Kredit-kredit Hapus Buku sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku
- Membuat Perencanaan Penurunan Kredit NPL oleh Kepala Bagian Kredit dan Remedial
- Pembahasan tentang kasus Fraud oleh Mantan Karyawan atas nama Cornelis Djo untuk dilaorkan ke Pihak Berwajib, Pengadaan Seragam dan Kartu Nama untuk pegawai Kredit dan Remedial serta Rencana Pensiun Karyawan atas nama Kornelis U. Dondoe yang akan dilakukan pada bulan September 2019

➤ Rapat IV tanggal 10 September 2018

Peserta Rapat :

- Komisaris
- Direksi
- Kepala Bagian Kredit dan Remedial
- Staf bagian IT dan Pelaporan

Materi Rapat :

- Evaluasi Kinerja Kerja sampai dengan bulan Agustus 2019
- Pemaparan Strategi dan Action Plan untuk bulan September 2019
- Pemaparan Rencana Simulasi Hapus Buku
-



8. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR Nusantara Abdi Mulia selama tahun 2018 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi.

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Nusantara Abdi Mulia selama tahun 2018 tidak ada.

10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu untuk kepentingan sosial, politik ataupun lainnya selama tahun 2018 tidak ada.

B. Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Abdi Mulia periode Desember 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Nilai Komposisi GCG sebesar 2.68 dengan prediksi Cukup Baik
- Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	10.00%	3	0.3
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	3	0.6
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	2	0.2
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	3	0.15
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	3	0.15



7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	2	0.1
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	3	0.23
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7.50%	2	0.15
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	15.00%	3	0.45
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	3	0.15
	Nilai Komposit	100.00 %		2.68
	Prediksi Komposit			Cukup Baik

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR Nusantara Abdi Mulia, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Komite-komite dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

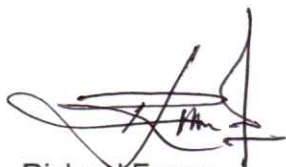
C. Penutup



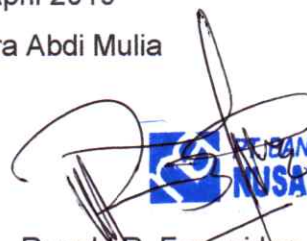
Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Abdi Mulia tahun 2018 untuk periode penilaian 31 Desember 2018 yang disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 4/POJK.03/2015 dan disempurnakan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, yang telah mengungkapkan aspek Transparansi Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan periode penilaian 31 Desember 2018. Sehingga dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder sebagai bentuk Pelaksanaan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Independensi, Pertanggungjawaban dan Kewajaran BPR.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Nusantara Abdi Mulia tahun buku 31 Desember 2018.

Kupang, 30 April 2019
PT. BPR Nusantara Abdi Mulia



Richard Funay
Komisaris



Ronald R. Fanggidae
Direktur



**SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2018
PT. BPR NUSANTARA ABDI MULIA**

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) + (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	20.00%	3	0.6	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	15.00%	3	0.45	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip GCG
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	2	0	Pelaksanaan tugas Komite telah berjalan secara efektif, telah terlaksananya program kerja komite melalui rapat komite, adanya rekomendasi komite kepada Dewan Komisaris yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris kepada dewan Direksi atas perkembangan usaha bank
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2	0.2	Benturan kepentingan yang terjadi dalam hal adanya Kebijakan Direksi yang menyebutkan bahwa Direksi yang tidak menjabat lagi, dapat menjadi Pegawai di Bank ybs, sedang dilakukan proses perubahan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	3	0,3	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, telah melakukan [enguian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	3	0,3	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan SPFAIB, SKAI menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	2	0.05	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	3	0.3	Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, telah dilakukannya penetapan limit credit, namun pemantauan profit risiko belum didukung dengan SIM yang memadai
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7.50%	2	0.15	Tidak terdapat pelanggaran da pelampauan BMPK, namun kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besar sedang dalam penyempurnaan
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7.50%	3	0.23	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, namun dengan adanya home page PT. BPR Nusantara Abdi Mulia, bank belum membuat ketentuan yang mengatur penggunaannya, sehingga terjadi kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan tertentu pada home page bank.
11	Rencana Strategis Bank	7.50%	3	0.23	Rencana Bisnis bank telah disiapkan sesuai dengan letentuan dan telah memperhatikan rencanna kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis bank
Nilai Komposit		100.00%		2.81	Cukup Baik

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : PT BPR NAM

Uraian Dokumen : Laporan Pelaksanaan Penerapan
BPO Kelak Tahun 2018

Jumlah : 1 Berkas

Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy

Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia

Ditujukan Kepada : Kopas OK Prov NTT

Yang menerima,

Kupang, 30 Apr 2018
Yang menyerahkan,

Dedi M

Jeerius

No. Agenda Unit Kearsipan :

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl :

Yang Menerima

Yang Menyerahkan